

SUAR insight

Ringkasan Eksekutif Spotlight: Membaca Pertumbuhan Menajamkan Kebijakan

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014-2025-1
(Dalam persen)



SUAR

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif: Membaca Pertumbuhan, Menajamkan Kebijakan	3
Jangan Melihat Gajah Hanya dari Buntutnya	6
Membaca Utuh Pertumbuhan Ekonomi	15
Efisien dan Antibocor di RAPBN 2026	27
Deregulasi yang Ditunggu Pengusaha	36



Ringkasan Eksekutif: Membaca Pertumbuhan, Menajamkan Kebijakan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyimpulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tahun 2025 tumbuh 5,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penulis: Mukhlison, Gianie, Harits Arrazie, dan Dian Amalia Ariani

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2025 tumbuh 5,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

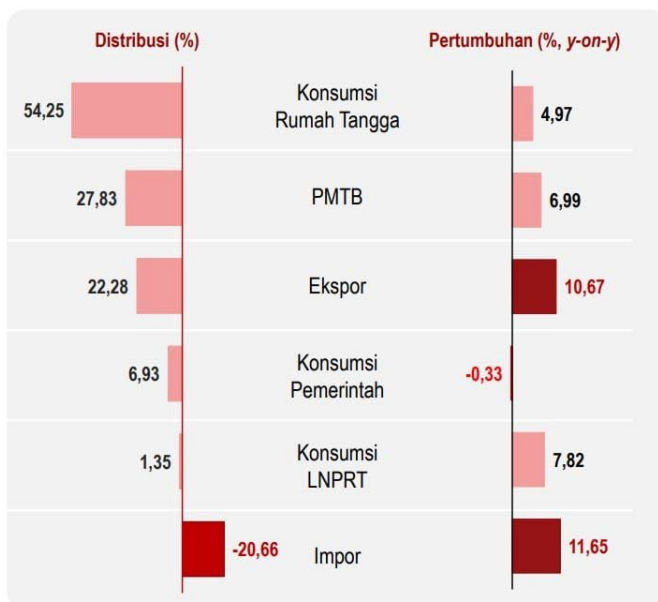
Temuan BPS yang seharusnya disyukuri itu, malah memicu tanda tanya. Banyak yang meminta klarifikasi metode penyusunan laporan soal pertumbuhan ekonomi oleh BPS.

Baca wawancara eksklusif SUAR dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, termasuk soal penyusunan data pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025, silakan klik tautan di sini.

Namun, data dari BPS juga menunjukkan adanya harapan, tumbuhnya kinerja ekonomi yang positif di masa depan.

Harapan sektor industri

DI SISI PENGELUARAN, EKONOMI INDONESIA DITOPANG KONSUMSI RT DAN INVESTASI



Konsumsi rumah tangga dan PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi pada Triwulan 2-2025.



Seluruh komponen pengeluaran tumbuh, kecuali komponen Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi.



Pertumbuhan tinggi terjadi pada komponen Ekspor dan Impor.

- ✓ **Pertumbuhan Ekspor didorong:** kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara.
- ✓ **Sementara pertumbuhan Impor didorong:** kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong, baik secara nilai maupun volume.

Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data BPS, beberapa komponen pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 adalah:

- Konsumsi rumah tangga: tumbuh 4,97%.
- Konsumsi LNPRT: tumbuh 7,82%.
- Investasi (PMTB): tumbuh 6,99%.
- Ekspor: tumbuh 10,6%.
- Impor: tumbuh 11,6%.
- Pengeluaran pemerintah: mengalami kontraksi sebesar -0,33%.

Data apa saja yang digunakan BPS terkait metodologi penyusunan laporan pertumbuhan ekonomi, baca laporan lengkapnya [di sini](#).

Menyusul data pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan, dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025, pemerintah mengirimkan sinyal optimisme dalam merancang anggaran pengeluaran dan belanja negara.

Arsitektur APBN 2026 dirancang dengan belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, pendapatan negara Rp 3.147,7 triliun, dan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB.

Presiden Prabowo menyatakan pemerintahannya akan melakukan perombakan terkait alokasi anggaran negara, sehingga bisa lebih efisien dan efektif untuk bisa memakmurkan bangsa.

Langkah yang akan diambil, di antaranya, penghematan pengeluaran negara, dan mencegah kebocoran anggaran yang selama ini merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Target Tinggi APBN 2026

Defisit RAPBN 2026 ditargetkan Rp639 triliun (2,48% PDB), lebih rendah dari proyeksi 2025 sebesar Rp662 triliun (2,78% PDB). Pertumbuhan ekonomi 2026 dipatok 5,4%; risiko terbesar bila tidak tercapai adalah penerimaan negara meleset,

defisit melebar, dan pemerintah terpaksa memangkas belanja. Bagaimana cara pemerintah melakukan efisiensi dan mencegah kebocoran RAPBN 2026, silakan baca di sini.

Untuk menjaga keberlanjutan kinerja ekonomi, pemerintah juga mulai melakukan penyederhanaan aturan yang dirasa menghambat pertumbuhan, atau deregulasi. Tercatat sejak akhir Juni 2025, pemerintah menetapkan kebijakan Deregulasi Kebijakan Impor dan Kemudahan Berusaha.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menerbitkan peraturan menteri (permendag) baru yang terdiri dari delapan klaster komoditas untuk memudahkan perubahan, karena permendag bersifat dinamis.

Selain itu, pemerintah saat ini sedang melakukan pembahasan terkait deregulasi mengenai kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Dan, membentuk Satgas Deregulasi khusus TKDN yang dimaksudkan untuk membahas perubahan format menjadi berbasis inovasi dan insentif, bukan hanya kewajiban persentase komponen dalam negeri.

Apa saja deregulasi yang diinginkan pengusaha, baca ulasannya di sini.

Selamat membaca, nyalakan SUAR mu Chief!!



Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti (SUAR/Ahmad Afandi)

Jangan Melihat Gajah Hanya dari Buntutnya

Pemerintah mendorong perlunya BPS meningkatkan kualitas dan akurasi data nasional

Penulis: Mukhlison, Gianie, Harits Arrazie, dan Dian Amalia Ariani

Wawancara eksklusif

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

Menghadapi polemik di ruang publik, yang dipicu oleh temuan lembaganya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti lebih berhati-hati saat membuat pernyataan. Dirinya juga memilih untuk tak menanggapi, ketika ada yang meminta penjelasan kepadanya terkait rilis pada awal Agustus lalu yang menyebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 (y to y) mencapai 5,12% itu.

Winny, begitu Amalia akrab dipanggil, memang tak mau gegabah menanggapi pertanyaan-pertanyaan di publik, karena pertimbangan dirinya adalah bagian dari penyelenggara negara. Namun, Winny mengaku sebagai peneliti, dirinya ingin memberi edukasi kepada masyarakat terkait literasi data. “Agar jangan terpengaruh

oleh persepsi. Karena masyarakat Indonesia itu gampang dipengaruhi,” katanya.

Sebagai pemegang kuasa data nasional, posisi BPS kini memang begitu sentral. Hampir di setiap rapat terbatas bidang ekonomi, lembaga ini selalu menjadi institusi strategis yang selalu didengarkan temuan-temuannya saat rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Saking pentingnya institusi ini, Winny selalu diminta di awal rapat, untuk memberikan background fakta-fakta sosial ekonomi kepada peserta rapat terbatas Kabinet Merah Putih. “Ah, kata siapa itu,” ujar Winny, saat ditemui tim SUAR di ruangan kantornya kawasan Pasar Baru, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.



Amalia Adininggar Widyasanti (Suar/Ahmad Afandi)

Keterlibatan BPS dalam kerja di kabinet pemerintahan sebenarnya sudah dimulai sejak keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2007, di mana Badan Pusat Statistik BPS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden yang dipimpin oleh kepala setingkat menteri.

Lalu, peran institusi ini menjadi lebih signifikan, ketika pada Juni lalu Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi atau Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).

Terbitnya Inpres tersebut menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat agar tepat sasaran.

“

Dalam sebuah rapat terbatas, Presiden meminta BPS untuk segera mengumpulkan data dari seluruh kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri.

”

Sebagai pembuat kebijakan, Prabowo memang perlu menimbang berdasarkan fakta lapangan, data driven, yang menyeluruh. Hingga pada Juli 2025, dalam sebuah rapat terbatas, Presiden meminta BPS untuk segera mengumpulkan data dari seluruh kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri.

Sebagai catatan, pemerintah melihat pencapaian signifikan KEK sepanjang 2024 yang berhasil melampaui target investasi dan penyerapan tenaga kerja. Total investasi yang masuk ke KEK selama periode Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp 90,1 triliun, jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp 78,1 triliun.

Dari fakta ini, pemerintah mulai mendorong perlunya BPS meningkatkan kualitas dan akurasi data nasional. Namun, upaya pemutakhiran dan memperluas cakupan dan kualitas data ini, kadang malah memicu kontroversi publik.

Seperti saat BPS merilis data soal tingkat kemiskinan yang hasilnya angka kemiskinan berkurang. Saat itu BPS menyatakan per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47%, turun dari 8,57% pada September 2024. Ini merupakan angka yang terendah dalam dua dekade terakhir, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa.



Sejumlah anak bermain di kawasan kampung pemulung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (30/7/2025). BPS Sulawesi Selatan mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 698,13 ribu orang atau 7,60 persen dari total penduduk per Maret 2025, menurun sebanyak 38,35 ribu orang atau 0,46 persen poin (ANTARA FOTO/Hasrul Said)

Amalia menyatakan, pemutakhiran data itu sah-sah saja dalam sebuah upaya mencatat angka-angka terkait proses penyelenggaraan negara. “Kan berarti lebih banyak sumbernya, kita cek koherensinya,” kata dia.

Ditemui Tim SUAR di ruang kerjanya di kantor BPS lantai dua kawasan Pasar Baru, Jakarta, pada 25 Agustus 2025 lalu, Winny memaparkan metodologi BPS dalam menyusun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia juga mengkonter tuduhan-tuduhan yang ditujukan ke BPS soal independensi lembaga itu. Petikannya:

BPS sekarang semakin diandalkan dalam pembuatan keputusan pemerintah, namun sepertinya tantangannya jadi semakin besar?

Iya. BPS sudah ada sejak 1945, sejak merdeka. Kita juga sudah sejak lama keluarkan angka PDB, tapi kenapa baru digoyang sekarang? Waktu itu juga pernah keluarin data yang beda dari konsensus. Ini kan tergantung dari situasi politik, tapi apakah kita mau dipengaruhi situasi politik? Jangan, dong, kita harus objektif.

Apakah metode perhitungan PDB ini sama seperti yang pernah di tahun-tahun sebelumnya?

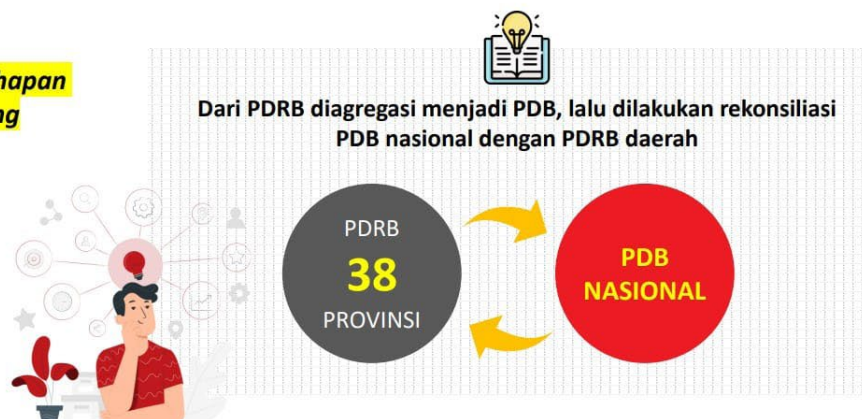
Sama. Menghitung PDB itu ada sistem, ada pakem, gitu kan, harus ikut. World Bank sendiri bilang untuk menghitung tingkat kesejahteraan di suatu negara, diukur pakai National Poverty Line.

Bagaimana metode BPS menentukan angka PDB di Indonesia?

PDB DIHITUNG DARI BERBAGAI SUMBER DATA YANG KOMPREHENSIF...



... dan disusun melalui tahapan serta proses berjenjang (back-to-back)...



Kita hitung PDB itu enggak main-main. Sumber data ada di 38 provinsi, ratusan survei yang kita lakukan. Variabel menyusun PDB itu ada 1.058. Makanya kita langsung mengukur di lapangan .

Banyak pihak menilai data BPS soal Purchasing Managers' Index (PMI) yang jadi dasar penentuan pertumbuhan kurang valid?

Itu pakai data PMI-nya siapa? Berapa coba respondennya? Kita punya Seruti (Survei Rumah Tangga Triwulanan), respondennya 76.000, mau dibandingkan dengan yang respondennya 400? Bank Indonesia juga punya PMI dengan zona ekspansi kan? Ada sekitar 600 responden.



Kepala BPS Amalia Adininggar Widayanti menerima wawancara Tim Suar, Senin, 25 Agustus 2025 (Suar/Ahmad Afandi)

BPS juga dinilai kurang tepat memasukkan data terkait kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Tanggapan Anda?

Kita punya pendataan, kita tiap bulan punya survei industri besar, dan sedang. Survei itu tiap bulan. Di sisi lain, kan, namanya setiap pendataan itu ada proses peningkatan kualitas, ya wajar dong.

Pemutakhiran sumber data itu tidak menyalahi metodologi?

Enggak menyalahi. Karena kan berarti lebih banyak sumbernya, kita cek koherensinya. Kita ada 20.454 pegawai. Semuanya turun.

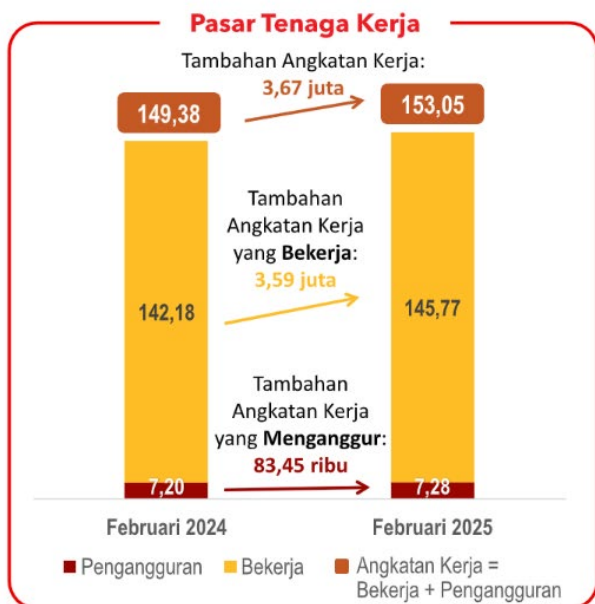
Untuk data kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, apakah dalam pengukuran di periode sebelumnya juga ada?

Ada, kita punya datanya. Dan, data industri itu komponennya banyak. Nah, ini lihat, semua survei ini kita lakukan terus untuk menghitung PDB. Masing-masing direktorat sama daerah itu punya, ada survei industri besar, sedang, ada survei industri kecil, ada survei konstruksi, ada survei harga. Semua masuk ke PDB.

Sektor industri dalam laporan BPS mengalami kenaikan kinerja, tapi sekarang banyak PHK?

PENYERAPAN TENAGA KERJA MENINGKAT 3,59 JUTA

Tambahan angkatan kerja yang terserap pasar kerja jauh lebih besar daripada yang menganggur



Februari 2025 dibandingkan Februari 2024:

- Tambahan penyerapan **angkatan kerja yang bekerja lebih besar** daripada tambahan angkatan kerja yang menganggur.
- Dari 3,67 juta penambahan angkatan kerja:
 - 3,59 juta penduduk (**97,73%**) terserap sebagai penduduk bekerja.
 - 83,45 ribu penduduk (**2,27%**) masih menganggur

Sumber: Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (5 Mei 2025)

Ayo, kita lihat statistik ketenagakerjaan Indonesia seperti apa. Kalau lihat gajah, mari kita lihat, bahwa gajah itu ada belalai, ada ekor, ada kaki, bukan buntutnya saja. Kalau kita lihat buntutnya aja, itu seperti orang cuma mau lihat PHK.



Sejumlah pencari kerja mengantre untuk melamar pekerjaan pada Job Fair di Al Fath Building Center, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/8/2025).

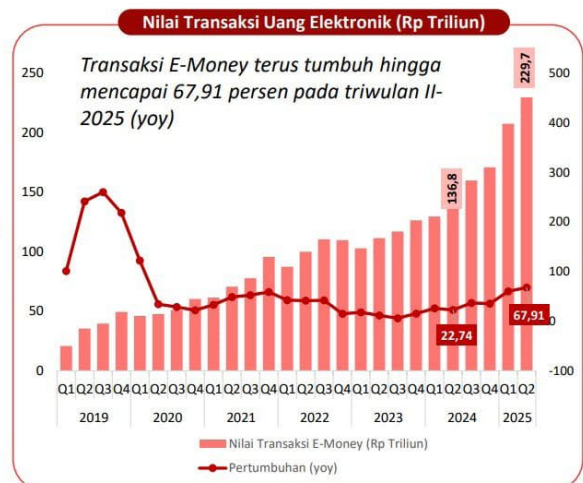
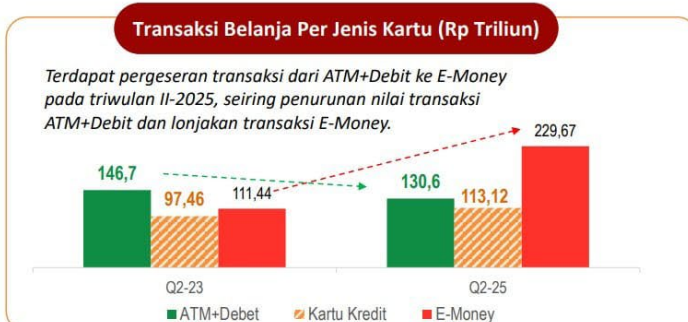
Lalu, bagaimana dengan situasi sektor perdagangan di mal yang teriak karena banyak pengunjung tidak beli dagangannya?

Konsumsi masyarakat ada pergeseran, kan sudah lama kita sinyalir. Lihat di sebelah mana pergeseran pola konsumsi. Apalagi ada Lebaran, Iduladha, libur panjang. Itu yang membuat konsumsi naik, meningkat di atas 6%. Makanan, minuman 4,15%.

Jadi saya bilang, sekarang harus lebih bijak. Shifting pola konsumsi itu benar sekali. Juga shifting cara transaksi belanja, nih, seperti penggunaan QRIS naik tinggi.

TERJADI PERGESERAN CARA TRANSAKSI MASYARAKAT....

Transaksi uang elektronik tumbuh impresif



Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

Bagaimana menjelaskan penjualan mobil turun, sementara konsumsi naik?

Kan gini, ini yang sering diributin nih, penjualan mobil turun, PMI turun itu aja yang diulang-ulang terus. Tapi data lain yang naik, enggak diekspose. Angkutan rel naik, ini menunjukkan ada mobilitas.

Jadi kalau lihat gajah, jangan lihat buntut. Saat buntutnya belok ke kiri, kepalanya, beloknya ke kanan. Namun yang dilihat belok ke kiri, si buntut itu.



Pesawat T50i Golden Eagle TNI AU melakukan manuver saat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Monas, Jakarta, Minggu (17/8/2025). (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

Pos pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga naik signifikan, isunya karena BPS memasukkan komponen pembelian alutsista, tanggapan Anda?

Itu bukan isu. Cara mencatatnya memang berdasarkan manual standar internasional. Semua belanja modal pemerintah masuk ke PMTB.

Jadi sebelum-sebelumnya juga sudah dicatat?

Sudah masuk. Semua belanja modal pemerintah, pokoknya apa pun belanja modal itu. Seperti bikin jembatan, beli gedung, infrastruktur, itu kan masuk belanja modal di investasi. Belanja modal pemerintah, APBN misalnya, masuk PMTB.

BPS juga menyatakan ada peningkatan terkait ekspor-impor, apa faktor pendorongnya?

Salah satunya harga CPO sedang naik. Selain itu, produk turunannya, seperti produk kimia, juga naik. Selain itu, ekspor untuk mesin dan peralatan elektrik juga naik signifikan, sebesar 48,51 persen. Produk kimia juga mengalami kenaikan. Namun, ada juga komoditas yang turun, misalnya batu bara, karena harga sedang turun.

Kenaikan ekspor juga terpengaruh isu front loading, importir Amerika memborong barang dari Indonesia sebelum dikenakan tarif. Anda setuju dengan pendapat itu?

Saya tidak tahu apakah ini termasuk front loading atau bukan. Yang jelas, tugas BPS adalah mencatat ekspor. Kebijakan seperti front loading atau tarif, silakan ditanyakan ke pihak lain; kami hanya mencatat.

Data ekspor barang yang dicatat BPS berasal dari Bea Cukai. Selain itu, kami juga mengumpulkan data dari PT Pos Indonesia, karena ada beberapa ekspor barang yang tidak tercatat di Bea Cukai.

Anda sering dipanggil menghadap Presiden, ada intervensi?

Saya dipanggil Presiden untuk mengikuti rapat terbatas (Ratas). Salah satu Ratas waktu itu ada paparan soal perkembangan kawasan ekonomi khusus. Saya lihat dong perkembangannya bagaimana. Saya cek data ini dan itu.

Ada pesan untuk masyarakat, terkait literasi statistik?

Mari kita membaca statistik yang utuh dan komprehensif. Mari kita cermati datanya dengan bijak dan hati-hati. Jangan kemudian terpengaruh oleh persepsi. Lihat data itu tidak boleh sepotong. Harus utuh. Itu saja.

MOBILITAS MASYARAKAT MENINGKAT

- Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tumbuh 23,32% (yoy)
- Jumlah penumpang mengalami peningkatan di berbagai moda transportasi:
 - Angkutan rel tumbuh 9,17% (yoy)
 - Angkutan laut tumbuh 16,79% (yoy)
- Indeks penjualan eceran bahan bakar kendaraan bermotor tumbuh 8,66% (yoy) (sumber BI)



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) pada konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto.

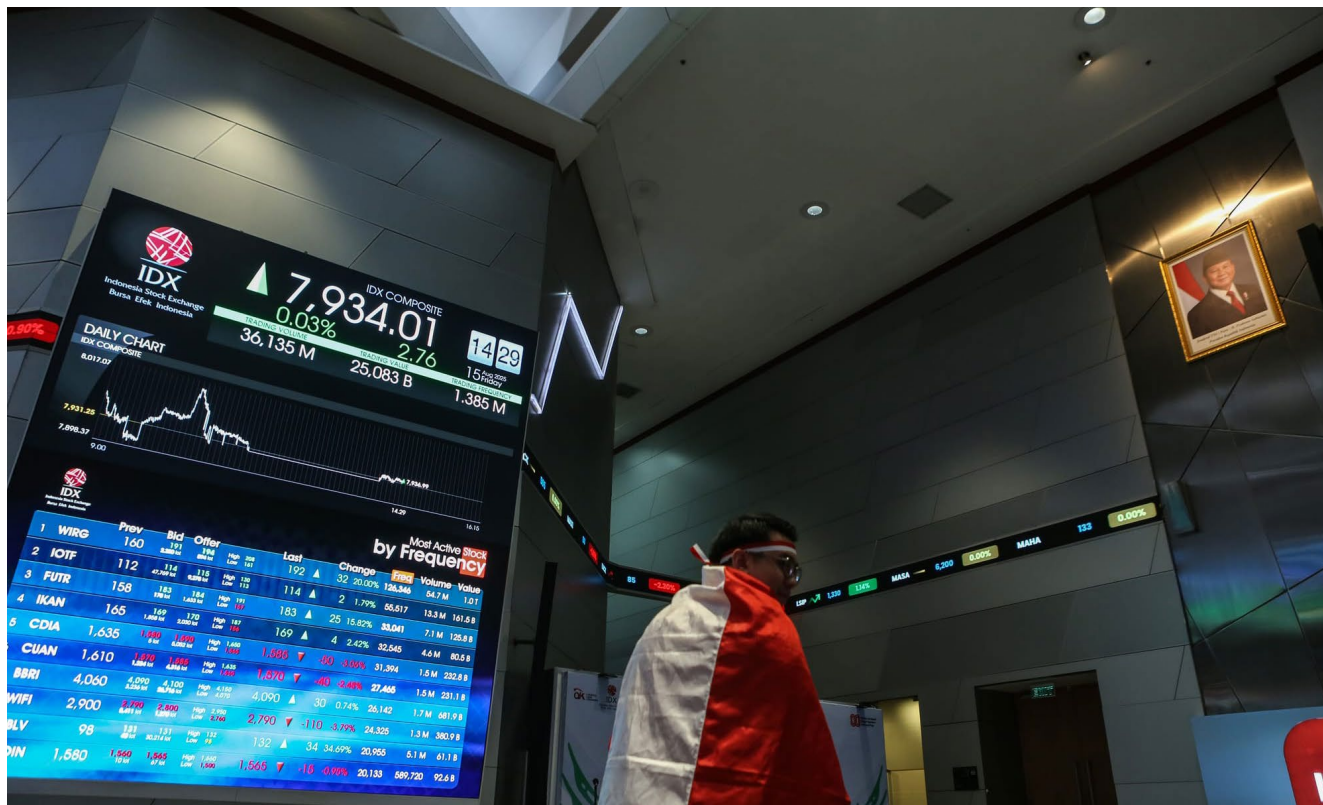
Membaca Utuh Pertumbuhan Ekonomi

Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2025 yang dikeluarkan BPS menuai kritikan. Sebagai institusi yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Metode pengumpulan data dilakukan profesional dan independen.

Penulis: **Mukhlison, Gianie, Harits Arrazie, dan Dian Amalia Ariani**

Pertumbuhan ekonomi positif lazimnya disambut baik. Tapi, tidak demikian halnya setelah pemerintah melansir pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2025 yang naik menjadi 5,12% secara tahunan.

Angka tersebut menimbulkan tanda tanya, bahkan keraguan. Bagaimana bisa dalam kondisi ekonomi masyarakat yang sedang melemah saat ini, ekonomi nasional justru menguat. Pada triwulan I-2025 ekonomi tumbuh 4,87% (tahunan).



Pekerja berjalan di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Karena meragukan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus 2025 lalu itu, sebuah lembaga penelitian Center for Economic and Law Studies (Celios) melayangkan surat permintaan investigasi kepada badan statistik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat 8 Agustus 2025.

Lembaga ini menduga ada inkonsistensi dalam data resmi pemerintah. “Kami berharap komisi statistik PBB segera melakukan investigasi teknis, termasuk investigasi metodologi penghitungan PDB Indonesia, khususnya triwulan II-2025,” kata Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal Celios.

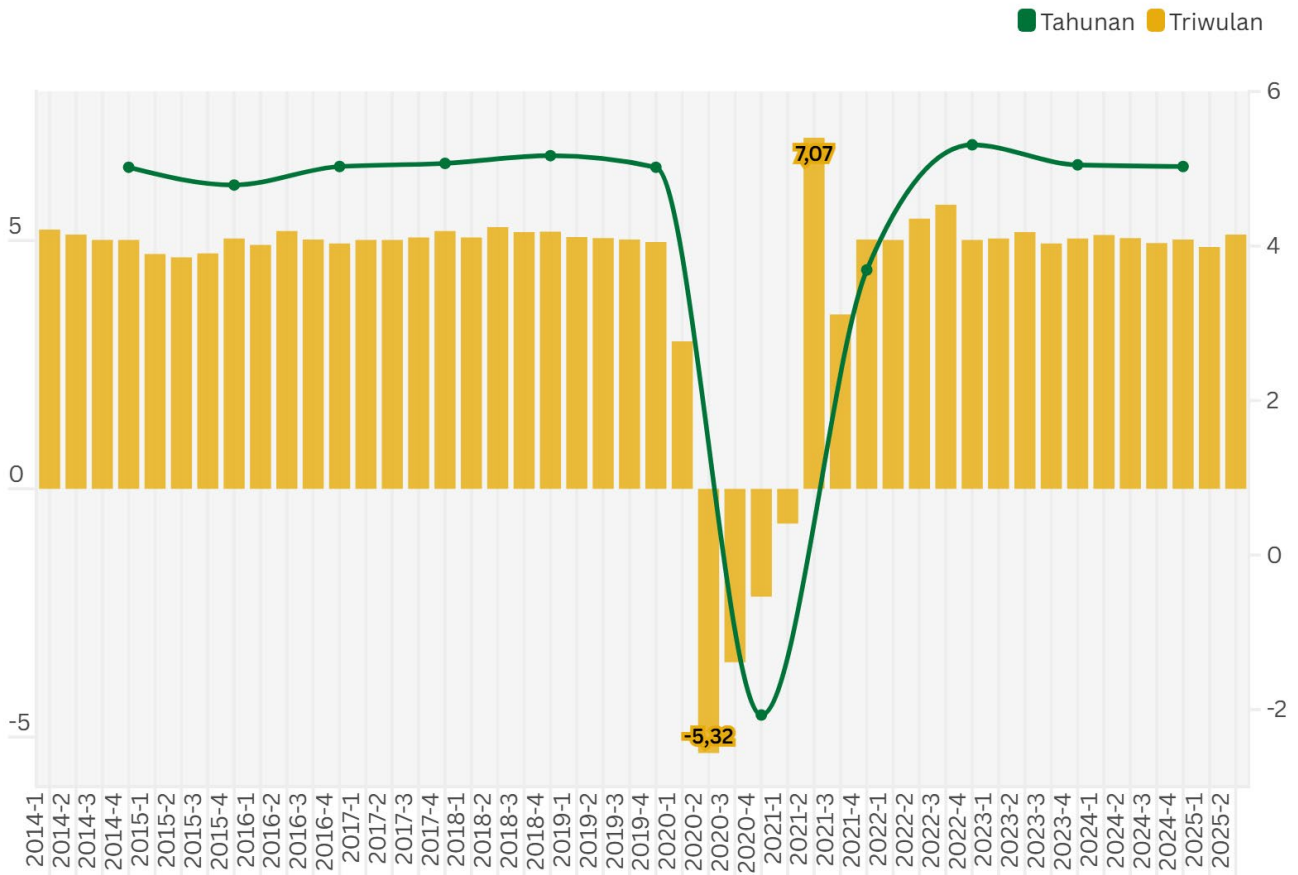
“

Celios menuding, terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data BPS itu yang bertentangan dengan fundamental principles of official statistics yang diadopsi oleh komisi statistik PBB.

”

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2014-2025

(Dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik. Diolah Tim SUAR/Gianie

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti tak mau menanggapi kritikan itu. Kepada SUAR, ia

mengaku sedang fokus melakukan pendataan angka pertumbuhan triwulan ketiga yang sedang berjalan.

Perbedaan indikator

Dalam rilisnya, BPS mencatat pertumbuhan triwulan II-2025 sebesar 5,12% itu didorong oleh berbagai indikator. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan terbesar adalah industri pengolahan (1,13%). Disusul dengan perdagangan (0,70%), informasi dan komunikasi (0,53%), serta konstruksi (0,47%).

Dalam struktur perekonomian kita, lapangan usaha industri pengolahan menjadi penopang utama PDB. Di triwulan II-2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sebesar 18,67%. Disusul sektor pertanian dan perdagangan masing-masing 13,83% dan 13,02%.



Dua wisatawan mancanegara mengunjungi Taman Fatahillah di kawasan Kotu Tua, Jakarta, Jumat (22/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Rizky Febriansyah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan II-2025 masih ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga (54,25%). Selanjutnya juga ditopang oleh komponen pembentukan modal tetap bruto yang menggambarkan kondisi investasi (27,83%) dan komponen ekspor barang dan jasa (22,28%). Kontribusi konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Bruto (PMTB) triwulan ini sedikit menurun dibandingkan triwulan I. Sementara komponen ekspor mengalami sedikit kenaikan.

Dari ketiga komponen ini, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi (2,64%). Namun demikian, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 10,67% (y-on-y), diikuti oleh pertumbuhan komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga atau LNPRT (7,82%) dan komponen PMTB (6,99%). Laju pertumbuhan

konsumsi rumah tangga hanya 4,97%. Sedangkan konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar -0,33%.

Jika dilihat per semester, pertumbuhan ekonomi hingga semester I-2025 tercatat sebesar 4,99%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 5,03%.

Namun, laporan BPS itu dianggap kurang sesuai dengan data yang dimiliki para ekonom atau analis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, menilai, hasil perhitungan BPS triwulan II itu terlalu tinggi, berbeda dengan temuan institusinya. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disimpulkan CORE berada di kisaran 4,7% hingga 4,8%, sehingga selisih yang muncul kali ini cukup besar.

Prediksi CORE didasarkan pada sejumlah leading indicators, seperti realisasi investasi yang dirilis BKPM, penjualan semen, realisasi belanja modal pemerintah, serta impor

barang modal dan bahan baku. Indikator tersebut, menurut Faisal, tidak menunjukkan lonjakan sebesar yang terekam dalam data BPS.



Pekerja kreatif melintas di depan pintu masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (26/8/2025). (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

Untuk konsumsi rumah tangga, perbedaan terlihat pada arah sejumlah tren. Indikator seperti indeks penjualan ritel, indeks keyakinan konsumen, dan penjualan barang tahan lama menunjukkan perlambatan pada triwulan II dibanding triwulan I. Namun, data BPS justru mencatat peningkatan konsumsi pada periode yang sama.

Faisal menjelaskan, perbedaan paling mencolok terlihat pada dua komponen terbesar pendorong pertumbuhan, yaitu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Untuk PMTB, CORE mengakui adanya perbaikan dibandingkan triwulan I, tetapi tidak sebesar yang dilaporkan BPS. Pada triwulan I, investasi tumbuh 2,3%.



Foto udara proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B di Jalan Tambak, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Proyek infrastruktur masuk dalam PMTB (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

Faisal menyatakan ia tidak serta-merta menilai BPS keliru. BPS, katanya, memiliki cakupan data yang lebih luas. Namun, ia menilai perlu

ada penjelasan rinci agar publik memahami alasan di balik angka itu. “Bukan hanya metodologi, tapi rincian komponennya,” kata Faisal.



Kapal tanker berbendera asing memuat minyak mentah kelapa sawit (CPO) di Dermaga B Curah Cair Pelabuhan Pelindo Multi Terminal Branch Dumai, Riau, Senin (18/8/2025). (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

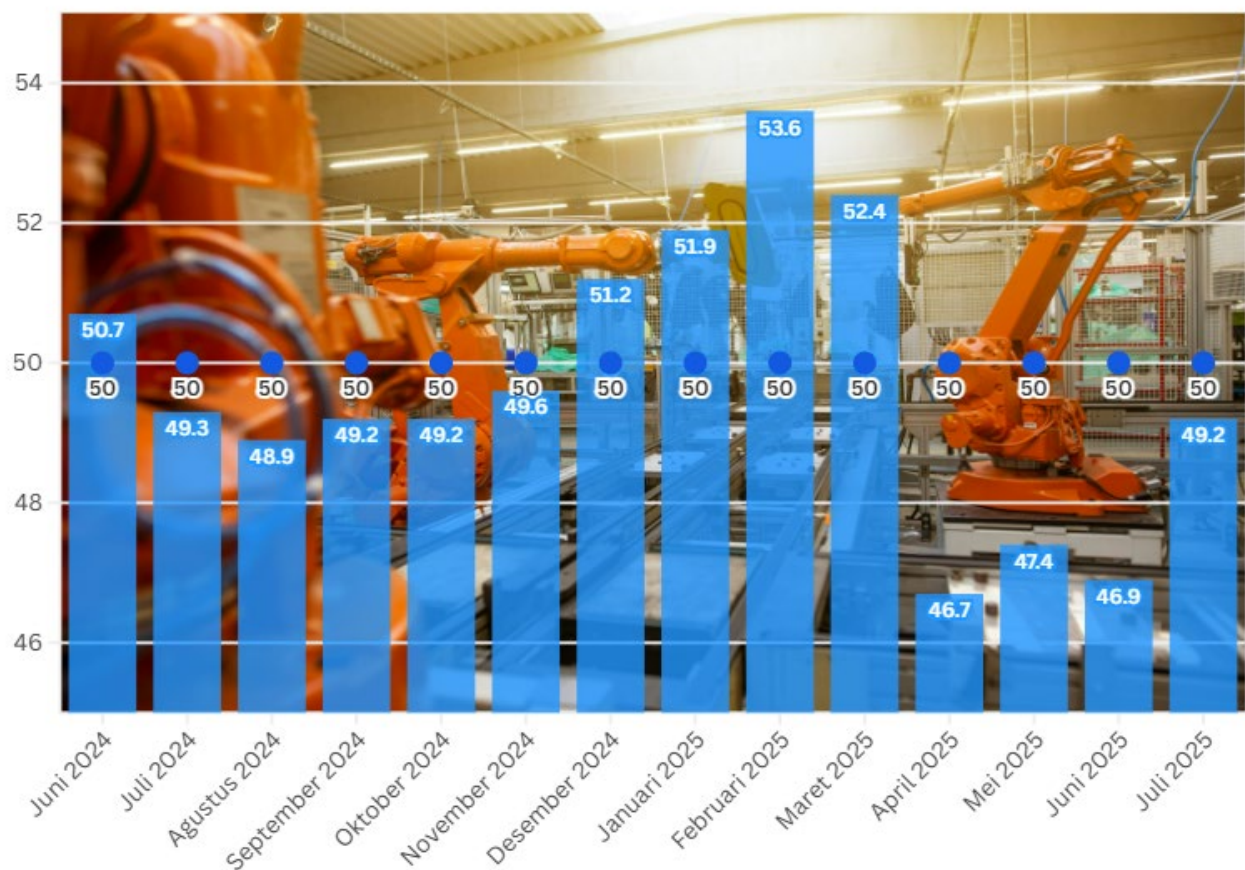
Sedangkan peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai angka BPS masih menyisakan tanda tanya karena sejumlah indikator utama menunjukkan tren melemah. Ia juga menilai perlu ada penjelasan rinci dari BPS agar publik memahami sumber pertumbuhan yang tercatat.

Menurut Eko, lonjakan industri pengolahan yang dilaporkan BPS

bertolak belakang dengan Purchasing Manager Index (PMI) dari S&P yang berkontraksi dalam beberapa bulan terakhir. “Ketika PMI berkontraksi tapi pertumbuhan industri pengolahan tinggi, itu menunjukkan ada gap besar antara leading indicator dengan data,” ujarnya. Hal itu membuat INDEF mempertanyakan validitas pertumbuhan sektor manufaktur.

Tren Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia

Ambang Batas PMI Index



Sumber: S&P Global • Grafis: Krisna/Suar.id. Foto: Simon Kadula/Unsplash
Indeks > 50 mengindikasikan ekspansi dan Indeks < 50 mengindikasikan kontraksi

SUAR SOLUTIONS FOR BUSINESS
IN EFFECTIVENESS

Konsumsi rumah tangga juga menjadi sorotan, karena kontribusinya yang paling besar bagi pertumbuhan. Eko menilai BPS harus menunjukkan indikator konsumsi yang mendukung data tersebut, sebab, berbagai

leading indicator justru mengarah pada perlambatan. Tanpa kejelasan itu, katanya, sulit menilai apakah peningkatan konsumsi benar-benar terjadi di lapangan.

ada sisi ekspor, Eko menilai pertumbuhan yang tercatat lebih bersifat temporer. Ia menyebut peningkatan ekspor ke Amerika Serikat disebabkan oleh fenomena front loading, ketika importir menimbun stok sebelum tarif Trump

19% diberlakukan awal Agustus.

“Setelah tarif berlaku, ekspor kita kemungkinan menyusut karena daya beli di Amerika juga melemah,” katanya.

Nilai Ekspor-Impor Indonesia

(Juta dollar AS)



Sektor investasi, terutama di pertambangan, menurut Eko juga memerlukan rincian lebih jelas. Ia menekankan bahwa peran deregulasi memang penting untuk mendukung investasi, tetapi dampaknya tidak bisa instan. “Biasanya butuh satu tahun sampai dua tahun. Tidak cukup hanya otak-atik regulasi, harus dikawal sampai investasinya benar-benar masuk,” ujarnya.

Sedangkan Ekonom Senior INDEF, Fadhil Hasan, menilai hasil penghitungan BPS ini memicu pertanyaan apakah ada yang perlu diperbaiki dalam metodologi, basis

data, atau sebab lain yang belum ter jelaskan dari temuan BPS. Sebab, banyak leading indicators justru menunjukkan pelemahan pada triwulan II-2025 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Seperti, PMI manufaktur berada di bawah 50 (kontraksi), penjualan wholesale turun 8,6% dan retail turun 9,5%.

Selain itu investasi langsung dari luar negeri atau FDI menurun, pertumbuhan kredit melambat, PHK melonjak 32%, indeks keyakinan konsumen menurun, hingga penerimaan PPN dan PPnBM yang anjlok hampir 20%.

Kinerja sektor riil dan pergeseran gaya hidup

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anne Patricia Sutanto, mengaku, angka pertumbuhan 5,12% tidak otomatis terasa di industri TPT.

“Kalau di pasar ekspor, ada sinyal pertumbuhan. Tapi secara umum di lapangan, kondisinya masih stabil, tidak jelek tapi juga tidak bagus,” katanya. Ia menegaskan, selisih tipis antara 4,9% dan 5,1% lebih banyak dipersoalkan para ekonom, sementara pelaku industri melihatnya biasa saja.

Sedangkan Piter Abdullah, ekonom sekaligus Co-Founder Sagara Institute

menyebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan beberapa leading indicators seperti penjualan mobil, penjualan semen, penerimaan pajak, dan indeks PMI. Ia mengakui awalnya sempat meragukan capaian pertumbuhan kuartal II.

Namun, menurutnya indikator-indikator itu sudah tidak sepenuhnya menggambarkan pola konsumsi masyarakat. Perubahan gaya hidup digital serta dominasi generasi milenial dan Gen Z membuat pola belanja mengalami pergeseran.

Fenomena Rojali dan Rohana bukan ukuran bahwa masyarakat tidak belanja atau tidak melakukan konsumsi.

“Fenomena Rojali dan Rohana bukan ukuran bahwa masyarakat tidak belanja atau tidak melakukan konsumsi,” ujar Piter. Ia menambahkan, penurunan penjualan mobil atau rumah tidak berarti konsumsi melemah. Saat ini pola berbelanja masyarakat juga berubah, lebih banyak yang berbelanja secara online dibanding datang ke mal.

Piter mencontohkan pergeseran konsumsi terlihat jelas dari pola

rekreasi anak muda. Menurutnya, pusat perbelanjaan bisa terlihat sepi, tetapi kawasan wisata alam justru ramai.

“Mal bisa sepi, tapi puncak Gunung Rinjani dan Semeru justru ramai dengan anak-anak muda,” katanya. Dari sisi ini, ia menegaskan konsumsi tetap tumbuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.



Sejumlah peserta berlari melintasi persawahan dengan latar Gunung Rinjani saat mengikuti Rinjani Color Run III 2025 di Sembalun, Lombok Timur, NTB, Minggu (24/8/2025). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi.

Selain konsumsi, Piter menyoroti investasi yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Ia menyebut data investasi memang tidak banyak diakses oleh para ekonom. Namun, lonjakan impor barang modal dan peralatan memberikan konfirmasi terjadinya investasi.

“Pertumbuhan investasi memang mengejutkan, tapi terkonfirmasi oleh pertumbuhan impor yang sangat besar untuk barang modal dan peralatan,” jelasnya.

Piter mengingatkan capaian pertumbuhan 5,12% di kuartal II belum menjamin target tahunan pemerintah. Ia menyebut tantangan besar ada di kuartal III yang biasanya ditandai perlambatan ekonomi.

Namun, masih ada peluang jika pemerintah mempercepat belanja negara. “Pemerintah bisa memacu belanja dan menghilangkan hambatan-hambatan agar perekonomian bisa melaju kencang pada kuartal 3 dan kuartal 4,” katanya.

Pengumpulan data sesuai kaidah

Terkait banyaknya keraguan terhadap data BPS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, selama ini pemerintah selalu memakai data BPS dalam pengambilan kebijakan. Karenanya, ia menilai, data dari BPS dinilai dapat dipercaya.

“Ya kita selama ini menggunakan (data) BPS kan, ya. Jadi, BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya, kita tetap mempercayai BPS,” ungkapnya.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025) (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menteri Keuangan juga meyakini, BPS sebagai institusi yang independen dan profesional. “Kan kita lihat semua indikator berdasarkan BPS. Data mengenai rumah tangga juga dari mereka. Jadi saya rasa BPS tetap berpegang kepada integritas dari datanya,” katanya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjamin data-data yang dikeluarkan pihaknya menggunakan standar internasional yang universal dan

dapat diuji kesahihannya. “Kan ada standar internasional. Data-data pendukungnya juga sudah oke. Udah semua. Pendukungnya sudah mantaplah itu,” kata Amalia.

Terkait beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan adanya penurunan dan perbedaan dengan dasar yang digunakan BPS, Winny, panggilan akrab Amalia, mengaku pihaknya memiliki metodologi pengumpulan data yang bisa dipertanggungjawabkan,

“

BPS memiliki tenaga survei yang tersebar seluruh Indonesia. Pengambilan sampel juga bisa dipertanggungjawabkan, dan respondennya 76.000 orang.

”

Misalnya dari tenaga pengumpul data, BPS memiliki tenaga survei yang tersebar seluruh Indonesia. Pengambilan sampel juga bisa

dipertanggungjawabkan. “Kita ada 20.454 pegawai. Semuanya turun (melakukan pendataan),” katanya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan perbandingan data BPS dengan data seperti Purchasing Manager Index (PMI) dari institusi lain yang pengumpulan datanya belum tersebar dan komposisi yang terbatas. Beda dengan yang dilakukan BPS.

Mengenai dimasukkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, menurut Winny, hal itu juga bukan hal baru. Namun bila spesifik ke sebuah kawasan, itu merupakan upaya pemutakhiran data.



Foto udara suasana Terminal Multipurpose Batang (TMB) saat kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (8/8/2025). (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

“Kita punya pendataan rutin. Kita tiap bulan punya survei industri besar, dan sedang. Di sisi lain, kan, namanya setiap pendataan itu ada proses peningkatan kualitas, ya wajar dong,” ungkapnya.

Mengenai perhitungan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) yang disusun BPS, juga bisa dipertanggungjawabkan metodenya, karena sudah mengikuti aturan internasional.

“Menghitung PDB itu ada sistem, ada pakem, gitu kan, harus diikuti. Namun, World Bank sendiri bilang untuk menghitung tingkat kesejahteraan di suatu negara,

diukur pakai National Poverty Line,” ungkapnya.

Soal kontroversi akibat temuan BPS terkait pertumbuhan, Winny menyebut, hal itu seharusnya tidak terjadi jika banyak orang melihat hasil perhitungan BPS itu dengan kaca mata data sosial ekonomi yang sangat tergantung pada konteks di lapangan.

Karena itu, Winny mendorong agar masyarakat punya literasi soal statistik. “Mari kita cermati datanya dengan bijak dan hati-hati. Jangan kemudian terpengaruh oleh persepsi. Lihat data itu tidak boleh sepotong,” ujarnya.



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya Jumat (15/8/2025). (ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)

Efisien dan Antibocor di RAPBN 2026

Pemerintahan mematok target tinggi dalam rancangan anggaran dan pendapatan di tahun 2026. Pembiayaan belanja yang akan ditopang pajak perlu dirancang matang agar tidak membebani rakyat.

Penulis: **Mukhlison, Harits Arrazie, dan Dian Amalia Ariani**

Indonesia akan mencapai anggaran berimbang. Itulah satu niatan baru yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, saat pidato kenegaraan penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Arsitektur APBN 2026 dirancang dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB. Presiden menyatakan, pemerintahannya akan melakukan perombakan terkait alokasi anggaran negara, sehingga bisa lebih efisien dan efektif untuk bisa memakmurkan bangsa.

Dalam paparannya, Presiden menegaskan akan melakukan penghematan pengeluaran negara, dan mencegah kebocoran anggaran yang selama ini merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” tegas Presiden.

Delapan Program Prioritas Pemerintahan Prabowo

- **Ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa.**
- **Ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa.**
- **Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul.**
- **Pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global.**
- **Kesehatan berkualitas yang adil dan merata.**
- **Penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KMDP).**
- **Pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa.**
- **Percepatan investasi dan perdagangan global.**
- **Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dinilai sebagai rancangan yang ambisius, dengan total belanja negara menembus angka Rp3.786 triliun.**

Angka fantastis ini disiapkan untuk mendanai delapan program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis, memperkuat pertahanan, hingga akselerasi investasi.



Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal negara dengan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efisien, transparan, dan tepat sasaran. (BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Anggaran besar tanpa bocor

Dalam pidato itu, Presiden Prabowo juga meminta dukungan seluruh kekuatan politik untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi pendapatan negara melalui perpajakan yang adil, serta pengelolaan aset dan sumber daya alam secara produktif.

Selain itu, kualitas belanja negara juga harus terus ditingkatkan. Belanja operasional yang tidak efisien akan dipangkas, sementara belanja yang memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik akan menjadi prioritas. “Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata,” tegas Presiden.

Arsitektur APBN 2026

- Pendapatan negara Rp3.147,7 triliun;
- Belanja negara p3.786,5 triliun; dan
- Defisit APBN 2026 Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam hal ini, Pemerintah akan mengandalkan transformasi digital dan perbaikan tata kelola untuk pemberantasan korupsi, meningkatkan penerimaan negara dan membantu mencegah kebocoran keuangan negara. Juga dilakukan perbaikan tata kelola untuk pemberantasan korupsi, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus membantu mencegah kebocoran keuangan negara.

Tak lupa juga diupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi. Salah satunya memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Juga ada integrasi dan digitalisasi layanan pada kementerian lembaga dan di pemerintah daerah, salah satunya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan sistem ini, sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah dapat dikontrol langsung melalui satu sistem yang sama.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo juga sudah menekankan adanya penggunaan anggaran yang efisien. Kepala Negara menginstruksikan jajaran pemerintah di seluruh tingkatan memerangi kebocoran anggaran.

Pengeluaran yang boros dan hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat dan yang tak produktif, dilarang. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh unsur agar mengurangi pengeluaran anggaran untuk kegiatan seremoni. “Kurangi kegiatan yang bersifat kajian atau seminar. Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung,” ujar Presiden di Istana Negara pada Desember tahun lalu.

Pengelolaan anggaran yang prudent dan inovatif

Di sektor pembiayaan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN akan dikelola secara prudent dan inovatif, menjaga rasio utang pada batas aman,

sekaligus memberdayakan peran BPI Danantara Indonesia dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.



Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)

Dengan pengelolaan fiskal yang sehat, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5%, dan angka pengangguran

terbuka turun ke kisaran 4,44%–4,96%. “Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasio Gini kita turun ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks Modal Manusia

“

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dinilai sebagai rancangan yang ambisius, dengan total belanja negara menembus angka Rp3.786 triliun.

”

Pertumbuhan dibiayai pajak, kepabeanan, dan cukai

Menjelaskan soal arah RAPBN 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan fiskal ini bersifat ekspansif dan terarah. “RAPBN 2026 disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Target Tinggi RAPBN 2026

- Defisit RAPBN 2026 ditargetkan Rp639 triliun (2,48% PDB), lebih rendah dari proyeksi 2025 sebesar Rp662 triliun (2,78% PDB).
- Pertumbuhan ekonomi 2026 dipatok 5,4%; risiko terbesar bila tidak tercapai adalah penerimaan negara meleset, defisit melebar, dan pemerintah terpaksa memangkas belanja.
- Asumsi makro: yield SBN 10 tahun 6,9% dan kurs Rp16.500/US\$

Pemerintah juga sudah menetapkan, anggaran terbesar, yakni Rp3.136,5 triliun, akan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Di antara agenda yang akan disuntik dana besar adalah ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, serta pengembangan koperasi dan UMKM.



Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan hasil pembahasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR ke-3 masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Sedangkan proyeksi pendapatan negara juga melonjak, dipatok sebesar Rp3.147,7 triliun, dengan pendapatan pajak menjadi andalan utama. Meskipun demikian, pemerintah harus mengantisipasi defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun, atau sekitar 2,48% dari PDB, yang akan ditutup melalui pembiayaan utang.

Transfer ke daerah juga mendapat porsi signifikan, sebesar Rp650 triliun, dengan tujuan menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian daerah. RAPBN 2026 ini diharapkan menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Air, meskipun tantangan global masih membayangi.

“

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, sumber pendapatan negara akan ditargetkan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp343,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455,0 triliun.

”

Terkait target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun atau naik 9,8% pada tahun 2026 Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, sumber pendapatan negara akan ditargetkan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp343,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455,0 triliun.

“Target pendapatan negara target cukup besar. Kalau kita lihat, kinerja selama tiga tahun terakhir, itu kenaikannya hanya sekitar 5,6

persen [2023]. Bahkan, tahun ini kemungkinannya hanya 0,5 persen, maka reform di bidang pajak, PNBP, kepabeanan dan cukai menjadi sangat penting,” jelasnya.

Ia mengungkapkan strategi mencapai target penerimaan pajak akan dilakukan pemerintah melalui optimalisasi sistem perpajakan digital terbaru yaitu Coretax, dan sinergi pertukaran dari kementerian/ lembaga (K/L), juga sistem pungutan digital dalam negeri dan luar negeri.

POKOK PENGATURAN		
PERBANDINGAN SKEMA PAJAK LAMA VS BARU		
Skema Pajak	Lama (PMK-81/2024)	Baru
I. Perdagangan		
a. Jual	- PPH Pasal 22 Final • 0,1% (Bappebti) • 0,2% (Non-Bappebti)	- PPH Pasal 22 Final • 0,21% (Dalam Negeri) → Dipungut oleh PPMSE DN (PAKD) • 1% (Luar Negeri) → Dipungut oleh PPMSE LN atau setor sendiri
b. Beli	- Besaran tertentu PPN • 0,11% (Bappebti) • 0,22% (Non-Bappebti)	- PPN • Tidak dikenai PPN (dianggap surat berharga)
II. Jasa Platform	- Ketentuan Umum PPN • Dikenai PPH tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh)	- Ketentuan Umum PPN • Dikenai PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh)
III. Mining	- Besaran tertentu PPN 1,1% • PPh Final 0,1%	- Besaran tertentu PPN 2,2% • Dikenai PPh tarif Pasal 17 (Ketentuan Umum PPh)
IV. Penunjukan platform LN	Platform LN ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi perdagangan aset kripto melalui PPMSE (PMK-60/2022 stdd PMK-81/2024).	Platform LN akan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dengan menggunakan Kepdirjen Penunjukan (kriteria & administrasinya diatur dalam Perdirjen).

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto (tengah), Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama (kanan), dan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aarsal (kiri) memaparkan PMK 50, PMK 51, dan PMK 53 tahun 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Selain itu, secara simultan akan dilakukan penguatan join program dalam hal analisis data, pengawasan, pemeriksaan pajak, intelijen, dan kepatuhan pajak. “Pemerintah juga memberikan insentif daya beli, investasi, dan hilirisasi,” tambah Sri Mulyani.

Sementara itu, strategi mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai, yaitu mengintensifkan bea masuk perdagangan internasional sekaligus bea keluar untuk mendukung hilirisasi produk.

Secara parsial, menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) serta memperkuat penegakan hukum untuk pemberantasan produk barang kena cukai dan penyelundupan.

“Pada bidang PNBP, kita kan mengoptimalkan perbaikan tata kelola, inovasi, pengawasan dan penegakan hukum sumber daya alam (SDA). Kemudian penguatan sinergi K/L dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara),” ungkap Sri Mulyani.

Anggaran ketat untuk arah baru pembangunan

Arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026 memperlihatkan alokasi anggaran yang terpusat pada program-program prioritas. Selain sebagai instrumen ekonomi, APBN juga dianggap sebagai arah baru pembangunan ekonomi Indonesia dengan penekanan pada peran dominan negara.

Namun yang memicu pertanyaan, dengan postur anggaran yang

ditetapkan, apakah cukup membiayai program besar dengan anggaran jumbo itu. Dalam pidatonya Presiden menyebut, ada beberapa fokus utama yang jadi program prioritas yaitu pendidikan, program makan bergizi gratis, serta penguatan koperasi desa. Selain itu juga akan memperkuat sektor pertahanan, kesehatan dan meningkatkan investasi.



Pengunjung berpose di atas kendaraan tempur TNI yang dipajang pada Pameran Alutsista Korem 074/Warastratama di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). (ANTARAFOTO/Maulana Surya)

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai, ada beberapa titik yang perlu diperkuat dari RAPBN 2026, yaitu pada ruang fiskal yang sangat terbatas.

Defisit dipatok 2,48% PDB, sehingga untuk membiayai program-program besar, pemerintah berpotensi menaikkan penerimaan pajak agresif atau mengorbankan belanja lain.

Ini bisa menimbulkan crowding out terhadap konsumsi dan investasi swasta. Apalagi jika Bank Indonesia atau perbankan dipaksa ikut membiayai lewat kredit maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

Tren belanja negara juga semakin tersentralisasi di pemerintah pusat, sementara transfer ke daerah justru menyusut. Akibatnya, belanja modal makin kecil porsinya, sementara

belanja barang, subsidi energi, dan pos belanja lain-lain terus membengkak. Padahal, subsidi energi besar, sekitar Rp400 triliun, lebih banyak dinikmati kelompok mampu, sementara dampak subsidi pertanian masih minim.

Di sisi lain, dengan beban utang yang terus naik, hampir Rp9.000 triliun atau 39 persen PDB, dan penerimaan pajak yang sulit naik signifikan karena basis ekonomi informal masih besar, ruang manuver APBN akan makin sempit.

Karena itu, kata Deni, Pemerintah sebaiknya lebih menekankan efisiensi, transparansi, serta mengalihkan subsidi dari barang ke orang yang benar-benar membutuhkan. "Dengan begitu, anggaran negara bisa menopang program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi," jelasnya.

Tak perlu menumpuk telur di satu keranjang

Sedangkan Riandy Laksono, Head of Economic Department CSIS, melihat RAPBN 2026 melihat arah APBN 2026 masih minim strategi industrialisasi. Belanja besar lebih padat modal, padahal tantangan terbesar ada pada penciptaan lapangan kerja padat karya. Jika tidak ada diversifikasi, ketergantungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko menimbulkan mismatch spending.

Realisasi MBG sejauh ini juga rendah, baru Rp8 triliun dari target Rp71 triliun. Padahal dana besar itu ditarik dari pos lain seperti infrastruktur dan

perjalanan dinas. Akibatnya, belanja pemerintah justru bisa mengerem pertumbuhan.

Karenanya, pemerintah perlu lebih berhati-hati. Jangan pernah menumpuk telur dalam satu keranjang. Tidak hanya menggantungkan APBN pada MBG, melainkan perlu menyalurkan anggaran ke sektor lain yang lebih siap menyerap, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.



Siswa PAUD dan TK berdoa sebelum makan bersama di TK Negeri Pembina 8 kompleks Pemakaman Umum Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (20/8/2025). (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Terakhir, modal politik besar Presiden Prabowo sebaiknya dipakai untuk reformasi struktural yang sulit. Seperti, deregulasi perdagangan, investasi, dan ketenagakerjaan, agar industri padat karya bisa bangkit kembali.

Sebab, masalah utama Indonesia bukan hanya soal makan, tetapi bagaimana menyediakan lapangan kerja yang layak. Sedangkan strategi ekstensifikasi atau perluasan basis pajak akan sulit dilakukan dalam waktu dekat, kecuali ada percepatan industrialisasi atau peningkatan jumlah pekerja formal.

“Pertanyaannya, pada 2026 defisit akan ditutup dari mana? Target penerimaan pajak yang dipatok naik 13% saya rasa tidak realistis, karena secara historis kenaikan kita hanya 5%–6%, kecuali saat terjadi commodity boom seperti di era awal Presiden SBY,” ungkapnya.

Riandy juga mengingatkan, penerimaan negara sulit naik signifikan tanpa industrialisasi. Sektor padat karya, mulai dari tekstil, alas kaki, otomotif, hingga chip testing, perlu jadi fokus. Supaya itu terjadi, pemerintah harus berani melakukan reformasi regulasi: perdagangan bahan baku dan barang modal harus dipermudah, kebijakan ketenagakerjaan direformasi agar adil bagi pekerja sekaligus menarik investor, dan kepastian hukum diperkuat.

Jika sektor industri tumbuh, pekerja formal bertambah, basis pajak meluas, baru penerimaan bisa meningkat secara berkelanjutan. “Tanpa itu, target kenaikan penerimaan hingga 13% hanya akan jadi angka di atas kertas,” ungkapnya.



Konferensi Pers Bersama DEREGULASI KEBIJAKAN IMPOR & DEREGULASI KEMUDAHAN BERUSAHA

JAKARTA, 30 JUNI 2025



© Kemenkeu Fo

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) didampingi sejumlah menteri menjelaskan Paket Deregulasi Kebijakan Perdagangan dan Kemudahan Berusaha di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Deregulasi yang Ditunggu Pengusaha

Pemerintah perlu melakukan berbagai deregulasi aturan demi merangsang kinerja sektor bisnis. Aturan yang membebani seharusnya diganti.

Penulis: Mukhlison, Gianie, Harits Arrazie, dan Dian Amalia Ariani

“Industri otomotif itu kompleks,” kata Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara. Ia menjelaskan, di dalam satu unit mobil terdiri dari sekitar 30.000 komponen, dan ribuan pabrik yang membuatnya di Indonesia. Sektor otomotif adalah industri padat modal dan padat tenaga kerja.

Maka, ketika kondisi ekonomi sedang tertekan, daya beli masyarakat melemah, akibatnya penjualan mobil turun, dampaknya bisa ke mana-mana. Yang mengejutkan, tahun lalu Indonesia hanya menjual 865.000-an unit mobil, sementara Malaysia mencapai 816.000-an unit.

Padahal penduduk Indonesia 280 juta jiwa, empat kali lipat Malaysia yang hanya 34 juta. Penjualan mobil di Malaysia bisa melesat karena pemerintahnya memberi insentif terhadap industri otomotif sejak pandemi. Sementara di Indonesia, insentif hanya berjalan dua tahun, 2021–2023. “Itu yang membuat kita makin berat bersaing,” kata Kukuh.

Pemerintah memang pernah memberikan insentif bagi industri otomotif. Seperti program relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) kendaraan bermotor yang diluncurkan oleh pemerintah pada Maret 2021, dan ini efektif mendorong utilisasi industri otomotif nasional di tengah penurunan drastis selama pandemi Covid-19.

“Setelah insentif dijalankan, penjualannya langsung naik, dan naiknya tidak tanggung-tanggung. Terbukti bahwa dengan PPnBM waktu itu dihapus untuk sementara waktu penjualannya langsung meningkat,” kata Kukuh.

Menurut Kukuh, stimulus ini bertujuan agar pabrik-pabrik ini jalan, termasuk pabrik komponennya. “Dan, kita sudah buktikan bahwa penerimaan pemerintahnya jadi melonjak naik. Saya harap pemerintah bisa memikirkan hal itu,” kata Kukuh.



Pengunjung memadati ruang pameran kendaraan pada hari terakhir pameran otomotif GIIAS 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (3/8/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Hanya dua tahun bertahan, insentif itu kemudian sudah dihapuskan. Di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi dunia, industri otomotif harus berjuang sendiri. Namun, perjuangan itu pada akhirnya memang belum bisa mendorong kembali gairah industri ini.

Pabrik otomotif di Tanah Air tercatat

telah melakukan PHK sekitar 7.000 orang karena penjualan tidak meningkat. Padahal industri ini menyerap 1,5 juta tenaga kerja. Jika volume penjualan terus menurun, industri akan terganggu, lapangan kerja berkurang, dan kontribusi ke pertumbuhan ekonomi pun melemah.

“

Masalah utamanya memang daya beli. Biasanya penjualan mobil bisa di atas 1 juta unit per tahun, tapi sekarang stagnan di 865.000.

”

Masalah utamanya memang daya beli. Biasanya penjualan mobil bisa di atas 1 juta unit per tahun, tapi sekarang stagnan di 865.000. Kelas

menengah, ada sekitar 10 juta orang, daya belinya hanya naik 3 persen, sementara harga mobil baru naik 7,5 persen.



Ilustrasi bursa mobil bekas Photo by Shane Ryan Herilalaina / Unsplash

Akibatnya, konsumen beralih ke mobil bekas. Pasar mobil bekas kini mencapai lebih dari 2 juta unit, yang artinya industri mobil baru tidak berkembang dan serapan tenaga kerja berkurang.

“Karena itu, jangka pendek kita masih butuh insentif. Dalam jangka panjang, perlu restrukturisasi pajak,” kata Kukuh.

Mobil-mobil seperti Avanza atau Xenia sudah menjadi kebutuhan mobilitas sehari-hari, bahkan dipakai untuk layanan transportasi daring. Sehingga, kendaraan jenis ini seharusnya tidak lagi digolongkan barang mewah yang dikenai PPnBM.

Saat ini, Avanza diproduksi di Indonesia, tapi pajak tahunannya mencapai Rp5 juta. Sedangkan di Malaysia hanya sekitar Rp 500.000, dan di Thailand lebih murah lagi,

sekitar Rp 150.000. “Perbedaan ini jelas memberatkan konsumen kita,” ujar Kukuh.

Selain itu, hambatan juga datang dari bahan baku. Misalnya, Indonesia punya pabrik baja dan pabrik pengolahan karet, tapi kualitas dan harga produknya belum memenuhi standar industri otomotif. Sehingga, tetap harus impor. Padahal jika bisa disuplai dari dalam negeri, industrinya akan lebih kuat.



Pabrik perakitan mobil di Boyolali, Jawa Tengah. (<https://esemkaindonesia.co.id>)

Ada juga persoalan kepastian hukum. Aturan yang sering berubah-ubah mengganggu ritme industri. “Industri otomotif menggunakan sistem just in time. Jadi, kalau ada satu komponen saja yang tersendat, produksi bisa berhenti dan biayanya mahal untuk memulai lagi. Itu yang sering tidak dipahami pembuat kebijakan,” tegasnya.

Intinya, jika orang bisa didorong untuk membeli mobil baru – bukan sekadar mobil bekas – industrinya akan tumbuh. Dengan populasi besar, Indonesia berpotensi memproduksi 3 juta unit per tahun. “Itu akan menarik investor,” ujar Kukuh. Tapi semua kembali pada dukungan kebijakan, insentif, kualitas bahan baku, dan kepastian hukum.

Ubah aturan demi keseimbangan

Akhir Juni 2025 lalu, pemerintah mulai melakukan perubahan aturan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan berusaha kepada pebisnis di Indonesia. Salah satunya adalah terkait penyederhanaan aturan impor.

Dengan adanya Deregulasi Kebijakan Impor dan Kemudahan Berusaha ini, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024, dan menggantinya dengan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Selain itu, Kemendag juga menerbitkan permendag baru yang terdiri dari delapan klaster komoditas untuk memudahkan perubahan, karena permendag bersifat dinamis.

Delapan klaster permendag tersebut, sesuai dengan klaster komoditas, yaitu Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil; Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan; Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.



Pabrik Tekstil (Apindo.or.id)

Kemudian Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang. Selanjutnya, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan

Impor Barang Industri Tertentu.

Lalu, ada Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; serta Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Bercacat.

Saat ini, kesembilan permendag tersebut dalam tahap pengundangan dan akan berlaku efektif 60 hari setelah diundangkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau

dan mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut guna memastikan kebermanfaatan bagi dunia usaha dan masyarakat luas.

Pembentukan Satgas Deregulasi TKDN

Pemerintah saat ini juga sedang melakukan pembahasan terkait deregulasi mengenai kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah juga sudah membentuk Satgas Deregulasi khusus TKDN ini dan membahas perubahan format menjadi berbasis inovasi dan insentif, bukan hanya kewajiban persentase komponen dalam negeri, sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk

meningkatkan fleksibilitas dan daya saing industri.

Deregulasi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha mengurus sertifikat TKDN, mempercepat proses, dan membuatnya lebih murah, serta sebagai respons terhadap kebutuhan relaksasi TKDN dalam negosiasi dengan Amerika Serikat.



Presiden Prabowo Subianto menerima Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 5 Desember 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman.

Kebijakan ini juga sebagai bagian dari strategi negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) yang mengenakan tarif resiprokal dan meminta pembebasan TKDN untuk produk AS

Pemerintah mengakui bahwa aturan TKDN yang kaku kurang fleksibel dan dapat menghambat investasi perusahaan teknologi global yang tidak siap dengan aturan tersebut.

Dari sisi pebisnis, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan, pihaknya mendorong adanya aturan yang bisa menekankan keseimbangan. Karena tidak semua industri siap memenuhi target TKDN yang tinggi, karena kondisi tiap sektor berbeda. Ada yang sudah siap, ada yang belum.

Karena itu, pemerintah perlu membuat roadmap agar penerapan TKDN tidak justru menyulitkan pelaku usaha, terutama yang masih bergantung pada bahan baku

impor. “Kami mendukung adanya insentif bagi perusahaan yang bisa memanfaatkan TKDN secara maksimal, bukan hanya sanksi,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menegaskan, dari perspektif pelaku usaha, deregulasi seharusnya membawa semangat penyederhanaan aturan yang selama ini membebani. Jika aturan terlalu banyak, otomatis menambah ongkos usaha.

“

Dari perspektif pelaku usaha, deregulasi seharusnya membawa semangat penyederhanaan aturan yang selama ini membebani. Jika aturan terlalu banyak, otomatis menambah ongkos usaha.

”

Padahal, semua sektor, baik energi, perhubungan, perikanan, perkebunan, maupun perhotelan, tentu berharap biaya operasionalnya bisa ditekan. “Karena itu, deregulasi dibutuhkan agar biaya operasional bisa turun,” ujarnya.

Dalam konteks energi, ia menambahkan, khususnya batubara yang sampai sekarang kontribusinya hampir 70% terhadap kelistrikan nasional, deregulasi akan sangat membantu. Jika biaya operasional perusahaan batubara dapat ditekan, profit bisa dimaksimalkan.



Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (25/8/2025). (ANTARA FOTO/Aditya Nugroho)

Dan dampaknya, para pengusaha sektor ini juga bisa bayar pajak lebih besar, melakukan ekspansi investasi, membeli peralatan, dan membuka lapangan kerja baru. “Jadi, deregulasi ujungnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Supaya iklim investasi di pertambangan lebih kredibel, kata Hendra, deregulasi menyeluruh

dibutuhkan. Misalnya, aturan soal royalti yang tinggi atau kewajiban penyimpanan DHE (devisa hasil ekspor) membuat biaya operasional semakin berat. Kalau regulasi ini disederhanakan, kepastian hukum terjamin, dan biaya lebih kompetitif, maka investor akan lebih tertarik masuk. Kalau tidak ada perubahan signifikan, kita akan kalah bersaing.

Perlu akselerasi Perbaikan Aturan

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anne Patricia Sutanto, menegaskan, tantangan utama industri seperti di Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), adalah pada aspek perizinan dan regulasi.

Ia menyebut pemerintah sudah mulai membenahi aturan, namun langkah itu masih terlalu lambat dibanding kebutuhan persaingan global. “Kompetitor kita bukan hanya sesama produsen di Indonesia, tapi juga Vietnam, Bangladesh, Kamboja, Myanmar, China, Turki, dan Mesir. Mereka lebih efisien karena perizinan lebih sederhana dan murah,” ujarnya.

Anne menegaskan, percepatan penyederhanaan regulasi menjadi syarat penting agar industri TPT nasional bisa meningkatkan daya saing. Deregulasi akan langsung berimbas pada turunnya biaya produksi, yang pada akhirnya memperbaiki nilai free on board (FOB) produk ekspor Indonesia. “Kalau cost turun, otomatis kita lebih berdaya saing. Market share bisa bertambah dan perjanjian perdagangan bebas bisa dimanfaatkan optimal,” katanya.

Ia menilai, tanpa perubahan signifikan, Indonesia berisiko kehilangan momentum dari diplomasi ekonomi yang sudah

dijalankan pemerintah. “Kalau kita tidak berdaya saing, bagaimana kita mau memanfaatkan perjanjian dengan Eropa, Amerika, dan RCEP secara optimal?” ujarnya.

Bagi Anne, tantangan terbesar industri TPT bukan pada pasar, melainkan pada kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang efisien dan kompetitif. Tanpa itu, kata dia, Indonesia hanya akan bisa mempertahankan posisi yang ada, bahkan tidak menutup kemungkinan kehilangan pangsa pasar.

Soal niatan pemerintah untuk melakukan deregulasi, menurut Head of Economic Department CSIS Riandy Laksono, sejauh ini beberapa deregulasi baru mencakup ratusan HS Code. Padahal barang yang diperdagangkan dunia jumlahnya puluhan ribu. Jadi pekerjaan rumah pemerintah masih panjang.

Presiden Prabowo dan pemerintahannya perlu mempercepat hal ini. Apalagi potensi relokasi produksi masih besar akibat tarif tinggi yang dikenakan Amerika Serikat ke Cina. “Indonesia seharusnya bisa menarik pabrik dari Cina untuk ekspor ke Eropa, Timur Tengah, dan wilayah lain, tidak harus ke Amerika Serikat,” katanya.

Ia mengusulkan deregulasi bisa dilakukan di tiga hal utama: deregulasi perdagangan, reformasi ketenagakerjaan, dan perbaikan regulasi investasi.

Pertama, regulasi ketenagakerjaan saat ini tidak menguntungkan siapa pun. Pekerja tidak terlindungi, sementara swasta keberatan dengan rigiditas aturan.



Sejumlah pencari kerja memadati Job Fair di Al Fath Building Center, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/8/2025).
(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Kepatuhan membayar upah minimum hanya di bawah 40% pesangon untuk pekerja PHK hanya diterima sekitar 30%, dan perlindungan sosial masih rendah. Di sisi lain, upah minimum yang tinggi tidak merefleksikan upah riil, sehingga pabrik enggan masuk. Akibatnya, peluang kerja di dalam negeri hilang. Karena itu reformasi ketenagakerjaan mendesak dilakukan.

Kedua, regulasi investasi. Kepastian hukum menjadi faktor kunci. Investor dari AS atau Eropa jarang masuk karena menuntut kepastian yang belum bisa kita tawarkan. Yang lebih banyak masuk justru investor dari Cina, Hong Kong, atau Asia lain yang terbiasa menghadapi ketidakpastian di negara berkembang.

“

Jika regulasi perdagangan, ketenagakerjaan, dan investasi dibenahi, Indonesia bisa menarik lebih banyak pabrik, meningkatkan jumlah pekerja formal, memperluas basis pajak, dan pada akhirnya memperkuat penerimaan negara.

”

Akibatnya, investasi per kapita Indonesia hanya sekitar US\$ 1.000, jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, atau Vietnam yang dua kali hingga empat kali lipat lebih tinggi.

“Jika regulasi perdagangan, ketenagakerjaan, dan investasi dibenahi, Indonesia bisa menarik lebih banyak pabrik, meningkatkan jumlah pekerja formal, memperluas

basis pajak, dan pada akhirnya memperkuat penerimaan negara,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, saat dikonfirmasi SUAR terkait perlunya insentif dan perluasan penyederhanaan aturan ini, mengaku pemerintah sedang menyiapkannya. “Masih dievaluasi,” katanya.